

SIARAN PERS

DISEMINASI DAN DIALOG MENDORONG AKSES LAYANAN PEREMPUAN MISKIN YANG LEBIH BAIK

SMERU Dokumentasikan Kontribusi Program MAMPU Terhadap Akses Layanan Perempuan Miskin Sepanjang 2017 – 2019

Jakarta, 28 September 2020 – Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) bersama dengan The SMERU Research Institute (SMERU) menyelenggarakan Diseminasi dan Dialog bertajuk “Mendorong Akses Layanan Perempuan Miskin yang Lebih Baik”. Kegiatan yang diadakan secara virtual ini adalah diseminasi dari penelitian tahap akhir yaitu periode 2017-2019 dalam kerangka studi longitudinal. Studi longitudinal sendiri telah dilakukan sepanjang tahun 2014-2019 yang merupakan dokumentasi kontribusi kerja MAMPU dalam meningkatkan akses dan penghidupan perempuan miskin terhadap layanan publik di 15 desa di wilayah kerja MAMPU dan non MAMPU di 5 (lima) kabupaten di Indonesia yaitu Deli Serdang-Sumatera Utara, Cilacap-Jawa Tengah, Timor Tengah Selatan-Nusa Tenggara Timur, Kubu Raya-Kalimantan Barat, dan Pangkajene dan Kepulauan-Sulawesi Selatan.

Kegiatan webinar ini dibuka oleh Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas dan Aedan Whyatt, *Counsellor for Poverty and Social Development, Australian Department of Foreign Affairs and Trade*. Dalam sambutannya, Subandi menyampaikan pentingnya memahami data dan konteks kemiskinan perempuan untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat. “Penting bagi kita untuk menganalisis data lebih dalam dan memahami konteks di masing-masing daerah, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat akses perempuan miskin dan juga kelompok rentan lainnya. Apa yang menjadi tantangan dan peluangnya sehingga kita dapat merumuskan strategi dan intervensi yang tepat dan efektif untuk mendekatkan akses berbagai layanan kepada kelompok yang paling membutuhkan” ujarnya. Subandi juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam melanjutkan dan memperluas praktik baik yang dihasilkan dari program MAMPU. “Meskipun Program MAMPU akan berakhir, tidak berarti kegiatan yang sudah dikerjakan juga berakhir. Kami ingin mendorong seluruh pihak agar praktik baik dari Program MAMPU ini dapat dilanjutkan, diinternalisasi, dan diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah sesuai konteksnya masing-masing” tambahnya.

Selama delapan tahun terakhir, Program MAMPU telah mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan meningkatkan akses perempuan miskin terhadap berbagai program pemerintah dan layanan dasar di 5 (lima) tema: (1) program perlindungan sosial, (2) akses perempuan miskin pekerja rumahan terhadap perlindungan sosial tenaga kerja, (3) akses perempuan buruh migran luar negeri terhadap perlindungan, (4) peningkatan status kesehatan dan gizi perempuan, dan (5) pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Stewart Norup, Senior Monitoring, Evaluation and Research Specialist, Program MAMPU menyatakan, “Dari hasil studi yang dilakukan SMERU, ditemukan bahwa terjadi perubahan akses perempuan miskin pada 2017–2019 yakni pada tema perlindungan sosial dan peningkatan gizi perempuan. Selain itu aksi kolektif juga ditemukan berkontribusi terhadap peningkatan akses perempuan miskin yang ditemukan signifikan di desa-desa dampingan MAMPU. Hal ini menjadi temuan penting terutama bagi Program MAMPU yang berupaya untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Perempuan yang aktif bersuara untuk menuntut layanan dari pemerintah memperlihatkan perempuan telah mulai berdaya. Ini menjadi langkah penting dalam agenda kesetaraan gender yang lebih luas.”

Studi ini mendata lebih dari 6.100 individu dari 1.732 keluarga miskin. Individu dan keluarga yang sama didatangi dalam tiap tahapan pengukuran yaitu *baseline* pada 2014, lalu *midline* 2017 dan *endline* pada 2019. Dengan mensurvei responden yang sama memungkinkan untuk mengukur perubahan akses di lokasi studi. Perubahan dipotret dari dua sisi yaitu dari penyedia layanan (*supply*) yang dalam hal ini adalah pemerintah, dan dari sisi pengguna layanan (*demand*) yaitu perempuan miskin. Perempuan miskin menjadi fokus studi karena kondisi mereka yang terbatas secara sumber daya sehingga lebih rentan untuk ditinggalkan. Upaya melihat perubahan dari dua sisi yang berbeda dan dengan metode analisis gabungan antara kualitatif dan kuantitatif menghasilkan gambaran yang menyeluruh terhadap kondisi akses layanan dan interaksi antar aktor di dalamnya. Khusus pada tahapan pengukuran *endline* dilakukan analisis perbandingan antara daerah yang didampingi MAMPU dan non MAMPU untuk mendapatkan temuan yang lebih spesifik atas kontribusi MAMPU terhadap perubahan yang terjadi.

Hafiz Arfyanto, Peneliti SMERU Research Institute, mengatakan “Secara garis besar, data kuantitatif yang dibandingkan antar periode dapat menangkap perubahan kondisi perempuan miskin dalam mengakses layanan dasar publik pada dua tahun

terakhir. Sementara itu, data kualitatif yang dikumpulkan akan mampu menjelaskan proses terjadinya perubahan pada akses tersebut.”

Salah satu hasil utama dari studi ini adalah pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pemerataan akses terhadap layanan publik. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah seluruh aktor yang mempengaruhi akses layanan dari sisi penyedia layanan (pemerintah) maupun pengguna layanan (perempuan miskin). Organisasi masyarakat sipil atau mitra MAMPU juga berperan, terutama dalam upaya sosialisasi, peningkatan pemahaman dan kegiatan lain yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik ataupun kebutuhan layanan pada perempuan miskin. Perempuan miskin memiliki tantangan ataupun kebutuhan khusus yang dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam mengakses layanan. Oleh karena itu, kita perlu memahami preferensi perempuan miskin untuk optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan layanan. Namun pemahaman atas karakteristik perempuan miskin tetap harus diimbangi dengan upaya peningkatan cakupan layanan yang dibutuhkan.

Upaya peningkatan akses terhadap layanan publik tidak lepas dari adanya faktor-faktor penghambat, seperti keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang layanan serta keterbatasan cakupan layanan. Faktor-faktor tersebut harus dieliminasi sehingga akses perempuan miskin terhadap layanan publik dapat lebih merata. “Apabila faktor-faktor penghambat ini tidak dihilangkan, upaya peningkatan akses yang selama ini gencar dilakukan akan jadi sia-sia, sehingga perempuan miskin menjadi semakin sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.” lanjut Hafiz Arfyanto dari SMERU.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

- **Kementerian PPN/Bappenas:** Qurrota A'yun (qurrota.ayun@bappenas.go.id)/ Nediana Sarrasanti A. (nediana.ardinugroho@support.bappenas.go.id)
- **Program MAMPU:** Atik Dewi (adewi@mampu.or.id)/Rhema Wijaya (rwijaya@mampu.or.id)
- **SMERU:** Ratri indah Septiana (rseptiana@smeru.or.id/08161361514)